

**UPAYA CAMAT DALAM MENINGKATKAN SISTEM PELAYANAN
PUBLIK BIDANG PEMBANGUNAN DI KECAMATAN
GEUMPANG KABUPATEN PIDIE**

Darmawan⁽¹⁾ Zulfikar⁽²⁾ Halimah⁽³⁾

Ilmu Administrasi Negara, Universitas Jabal Ghafur Sigli

e-mail: darmawan80.gp@gmail.com

ABSTRACT

Integration in providing services to the community is one of the success factors that can support the development of the District. The sub-district head, in carrying out his duties, coordinates all government agencies in the sub-district. In an effort to improve development at the sub-district level, the first person who plays a very important role and has a large contribution is the sub-district head and the gampong government itself. Various efforts have been made by the sub-district head in implementing and improving governance and development. The sub-district head can also communicate directly with all gampong officials and the community in his working area. However, all of these have not fully played a role in increasing development in the Geumpang sub-district due to various inhibiting factors. The aim of the research was to find out the public service system in supporting development in the sub-district. Geumpang, Pidie District and the obstacles encountered in increasing community participation in development programs. This study uses a descriptive method. To obtain data besides using field research also using library research. All the data obtained was processed and analyzed using qualitative methods. From the results of the study, it was found that the public service system in supporting development in Geumpang District had not been carried out properly due to various inhibiting factors. Obstacles encountered include the services provided which are still not optimal because the facilities and infrastructure owned such as computers, Keuchik offices from several sample villages do not yet exist, the community is not involved in the development planning process, so that community awareness is not optimal. It is recommended in In order to improve public services, it is necessary to provide the necessary facilities and infrastructure so that the services provided to the community are maximized and every meeting held relating to development should pay more attention to the aspirations of the community.

Keywords : District Head, Services, Development

ABSTRAK

Keterpaduan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat salah satu faktor keberhasilan yang dapat menunjang pembangunan Kecamatan. Camat dalam melakukan tugasnya melakukan koordinasi terhadap semua instansi Pemerintah yang ada di kecamatan Dalam usaha meningkatkan pembangunan ditingkat Kecamatan orang yang pertama sangat berperan dan mempunyai andil besar adalah Camat dan Pemerintah Gampong itu sendiri, Berbagai usaha telah dilakukan Camat dalam pelaksanaan dan peningkatan pemerintahan dan pembangunan, Camat juga bisa berkomunikasi langsung dengan seluruh Perangkat Gampong dan masyarakat yang ada diwilayah kerjanya, Namun semua itu Camat belum berperan

sempurnanya dalam rangka peningkatan pembangunan di Kecamatan Geumpang dikarenakan ditemui berbagai faktor penghambat. Tujuan dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui sistem pelayanan public dalam menunjang pembangunan di kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program-program pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Untuk memperoleh data disamping menggunakan penelitian lapangan juga menggunakan penelitian kepustakaan. Semua data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian ditemui bahwa sistem pelayanan publik dalam menunjang pembangunan di Kecamatan Geumpang belum terlaksana sebagaimana mestinya dikarenakan dijumpai berbagai faktor penghambat. Hambatan-Hambatan Yang ditemui antara lain adalah pelayanan yang diberikan masih kurang maksimal karena sarana dan prasarana yang dimiliki seperti komputer, kantor Keuchik dari beberapa gampong yang dijadikan sampel belum ada, masyarakat kurang dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga kepedulian masyarakat kurang maksimal. Disarankan dalam rangka peningkatan pelayanan publik perlu dilengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih maksimal dan setiap pertemuan yang dilakukan yang berkenaan dengan pembangunan hendaknya lebih mendengarkan aspirasi masyarakat.

Kata kunci: Camat, Pelayanan, Pembangunan

1. Pendahuluan

Beberapa cara yang dapat dilakukan meningkatkan sistem pelayanan publik bidang pembangunan di kecamatan Tangse Kabupaten Pidie. Pembangunan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh suatu bangsa menuju suatu perubahan yang lebih maju dan berkembang khususnya di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie. Kecamatan Geumpang akan dapat merasakan taraf hidup yang lebih layak, apabila pembangunan yang dilakukan dapat menyentuh kesemua lapisan masyarakat desa yang ada di Kecamatan Geumpang. Suksesnya berbagai program pembangunan hingga dapat menyentuh kesemua tingkat dan kepentingan masyarakat yang universal, kiranya banyak faktor yang mempengaruhinya. Menuntut komitmen semua komponen masyarakat, manajemen dan strategi yang tepat, Pemerintah Kecamatan berperan dan semua warga masyarakat turut menjadi pemain tidak sekedar penonton. Dengan

pelaksanaan pembangunan yang baik, yang terutama sekali menyangkut dengan perencanaan, pengawasan dan teknik pelaksanaan serta sistem komunikasi didalam menggerakkan partisipasi masyarakat dimana pembangunan itu dilaksanakan, disamping hal tersebut diatas ada hal lain yang perlu dimiliki adalah faktor peran aktif masyarakat sangat menentukan berhasil tidaknya kegiatan pembangunan yang dilaksanakan terlebih-lebih terhadap pembangunan yang diarahkan ke tingkat Pemerintahan yang paling rendah yaitu Desa atau dengan kata lain Gampong. Jadi program pembangunan tidak akan berhasil secara efektif dan efisien tanpa dukungan penuh oleh masyarakat secara nyata dalam proses pembangunan besar kemungkinan pembangunan dimaksud tidak berjalan lancar dan tidak mencapai target sebagaimana yang diharapkan.

Apabila hal ini terjadi, akan memberikan dampak negatif terhadap proses pertumbuhan dan dinamika pembangunan Gampong yang ada di Kecamatan Geumpang, yang dewasa ini semakin giat

dilaksanakan disetiap Daerah Kabupaten/Kota. Keberhasilan pembangunan ditingkat Kecamatan dan gampong tidak terlepas dari perannya pemimpin di tingkat Kecamatan dan gampong itu sendiri orang yang pertama sangat berperan dan mempunyai andil besar didalam menyesuaikan pembangunan ditingkat Kecamatan dan gampong adalah Camat dan Keuchik sebagai sebagai Administrator Pembangunan dalam wilayahnya sendiri. Namun kalau dilihat semua kegiatan Kecamatan tertumpu dan berdomisili di Gampong-Gampong. Oleh karenanya Camat telah berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan dan meningkatkan Pemerintahan di tingkat Kecamatan ataupun Gampong di dimana ia bertugas. Dalam hal ini proses pelaksanaan pembangunan, Camat dapat berkomunikasi langsung dengan seluruh Perangkat Gampong dan masyarakat yang ada dalam wilayah kerjanya

Rumusan masalah :

Berdasarkan pengamatan sementara yang telah penulis laksanakan dalam Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, bahwa Camat belum sepenuhnya berhasil dalam usaha meningkatkan pembangunan dikarenakan ditemui berbagai kendala ataupun hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat dirumuskan permasalahannya antara lain :

1. Sejauhmana sistem pelayanan publik dalam menunjang pembangunan di Kecamatan Geumpang?
2. Faktor apa yang menyebabkan sistem pelayanan publik belum sepenuhnya berhasil dalam menunjang pembangunan di Kecamatan Geumpang?

2. Studi Literatur

Pengertian Sistem

Sistem adalah suatu perpaduan yang kompleks antara beberapa bagian tertentu yang dapat disatukan menjadi bagian yang utuh dalam menjalankan suatu tujuan

tertentu. Oleh karena itu Sistem dalam arti teoritis adalah suatu kesatuan kerjasama yang terdiri dari bagian-bagian yang disebut dengan subsistem yang masing-masing subsistem bergerak pada bidangnya sendiri-sendiri, namun juga saling ketergantungan satu sama lainnya agar dapat mencapai suatu tujuan yang diharapkan bersama.

Definisi lain tentang sistem yang dikemukakan oleh Inu Kencana Syafie (2013:3) yaitu : “Suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang berhubungan dan yang disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama”. Definisi lain tentang sistem yang ditulis oleh Ludwig Von Bertalanfly yang dikutip oleh Inu Kencana Syafie (2013:10) menyatakan bahwa : “Sistem adalah merupakan himpunan unsur-unsur (elemen) yang saling pengaruh mempengaruhi, untuk dimana hukum tertentu menjadi berlaku”.

William A. Shorde/Dan Voich Jr. juga dikutip oleh Inu Kencana Syafie (2013:11) menjelaskan : “Sistem adalah seperangkat bagian (part) yang saling berhubungan, bekerja sedikit bebas, dalam mengejar keseluruhan tujuan dengan kesatuan lingkungan”.

Berdasarkan isi dari definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem adalah merupakan suatu kerangka sebagai dasar pengaturan prosedur-prosedur yang tersusun di dalam skema yang secara keseluruhan kegiatannya untuk melaksanakan suatu fungsi, dimana uraian definisi tersebut adalah menggambarkan dan mengarahkan untuk hal yang positif dalam menjalankan roda organisasi Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik

Pelayanan Publik

Secara sederhana kebijakan publik

adalah segala sesuatu yang diputuskan oleh Pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak dikerjakan. Pemerintah memutuskan untuk ikut mengelola sektor pertanian, terutama menetapkan harga beras, minyak goreng cengkeh dan tebu. Pada saat yang sama memutuskan untuk tidak mengelola sayur mayur, buah-buahan dan kentang.

Konsekwensi dari pada keputusan Pemerintah tersebut adalah merupakan perubahan dalam permintaan dan penawaran barang dan jasa publik. Dari uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa pelayanan publik adalah pengadaan barang dan jasa, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun non Pemerintah. Adapun barang swasta dicirikan oleh adanya revalitas, seperti baju, sepatu dan lain-lain. Baik barang publik maupun privat disektor permintaan (demand) ditentukan oleh produsen yang bertujuan mencari keuntungan, persediaan barang publik ditetapkan melalui proses politik.

Diantara keduanya terdapat barang swasta yang memiliki nilai strategis sehingga mengundang campur tangan Pemerintah untuk mengelolanya. Misalnya pangan, industri pupuk, industri kimia, industri otomotif dan sebagainya. Di sisi lain juga terdapat barang publik dimana swasta tertarik untuk mengelolanya seperti jalan tol, kesehatan, pendidikan, sampah, air minum dan sebagainya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pelayanan publik memiliki masalah sosial, ekonomi dan politik.

Dalam pelayanan publik, efektivitas dan efisiensi saja tidak dapat dijadikan patokan. Diperlukan ukuran lain yaitu keadilan, sebab tanpa ukuran ini ketimpangan pelayanan publik tidak dapat dihindari. Pentingnya ukuran ini juga memperhatikan bahwa Birokrasi Publik cenderung menghindari kelompok miskin rentan dan terpencil. Sementara itu telah umum diketahui antara efisiensi dan efektivitas merupakan *the big trade off*. Ketika Pemerintah memacu efisiensi

pelayanan publik untuk lapisan bawah, miskin dan terpencil yang biasanya diabaikan.

Untuk itu seorang Camat sebagai Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan adalah pelaksana dibidang Pemerintahan pembangunan dan Kemasyarakatan dalam Kecamatan dimana Camat tersebut bertugas, Jadi tugas pokok Camat memimpin Pemerintahan, Mengkoordinasikan Pembangunan dan membina kehidupan Kemasyarakatan.

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa Camat adalah Pemimpin atau Kepala Pemerintahan di tingkat Kecamatan yang diberi wewenang, tugas dan fungsi untuk menjalankan segala urusan Pemerintahan dan Pembangunan serta pembinaan kehidupan masyarakat. Dengan kata lain disebutkan bahwa Camat sebagai Administrator, Dinamisator dan Stabilisator ditingkat Kecamatan yang mempunyai peluang besar untuk menciptakan hubungan harmonis antara Pemerintah dan Masyarakat. Sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, dimana Pemerintah Daerah diwajibkan melaksanakan azas desentralisasi dan dekonsentrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan agar dapat terkontrolnya dengan baik dan bisa terintraksi dengan baik pula dalam masyarakatnya.

Pembangunan

Pembangunan merupakan perubahan dalam masyarakat luas yang meliputi segala aspek kehidupan manusia yang saling keterkaitan, seperti antara ekonomi dan sosial, politik dan pembangunan yang kesemuanya itu berada dalam satu ruang lingkup secara Nasional. Pembangunan merupakan suatu usaha dimana untuk membantu dan mendorong masyarakatnya agar dapat membangun berbagai fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam masyarakat. Hal ini sangat penting dalam mengisi dan meletakkan dasar-dasar bagi pertumbuhan pembangunan perekonomian rakyat. Kebijakan pembangunan merupakan suatu proses saling berhubungan satu dengan

yang lainnya dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Sasaran utama pembangunan adalah tercapainya landasan yang kuat bagi masyarakat untuk tumbuh dan berkembangnya kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dengan atas kekuatannya sendiri, dan cara pelaksanaan pembangunan pada setiap kesempatan selalu dianjurkan supaya ditekankan perlu adanya partisipasi masyarakat demi keberhasilan suatu program pembangunan yang akan dilaksanakan.

Oleh karena itu partisipasi satu pihak saja tidak banyak artinya, namun yang terpenting adalah bagaimana caranya supaya terlaksananya partisipasi tersebut dari kedua pihak dan bisa berjalan dalam pengelolaan serta penyelenggaraan pembangunan ditingkat Kecamatan dan Gampong-Gampong yang diperlukan dapat teratasi.

Di Indonesia pembangunan merupakan amanat konstitusi yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan Nasional. Perkataan pembangunan berasal dari kata dasar "*bangun*" yang artinya bangkit berdiri. Pengertian pembangunan sebagaimana yang didefinisikan oleh Sondang P. Siagian (2013:2) adalah suatu usaha atau rangkaian usaha mengujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara baik menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Nation Building)

3. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimana peneliti terbatas dalam mengungkapkan suatu masalah atau keadaan maupun peristiwa sebagaimana adanya untuk mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang akan diteliti, kemudian Sugiono

(2010:11) berpendapat bahwa pada penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan cara mendiskripsikan suatu masalah

4. Pembahasan

Pelaksanaan pembangunan itu sendiri disamping untuk meningkatkan pendapatan nasional, sekaligus harus pula dapat menjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat sesuai azas keadilan sosial sehingga disatu pihak pembangunan itu tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi, melainkan sekaligus mencegah melebarnya jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dengan menumbuhkan azas hidup sederhana, bukan saja untuk mencapai masyarakat yang makmur, melainkan juga untuk mewujudkan masyarakat yang adil.

Dilain pihak partisipasi masyarakat secara aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan semakin luas dan merata, baik dalam segi memikul beban pembangunan maupun pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie merupakan suatu upaya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. dimana Kecamatan Geumpang merupakan salah satu kecamatan yang ada dalam Kabupaten Pidie. Yang sedang giat-giatnya melaksanakan berbagai macam pembangunan yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

Pemerintah kecamatan Geumpang telah berusaha secara bersama-sama dengan segenap lapisan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan menurut kemampuan dan kekuatan yang ada, dimana hasilnya telah dapat dilihat dan dimanfaatkan oleh masyarakat, namun dari hasil-hasil yang telah dicapai tersebut masih dirasakan adanya kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan dimasa-masa yang akan datang. Kekurangan dimaksud adalah

disebabkan karena disamping kekurangan dan keterbatasan dana yang tersedia, juga disebabkan karena keterbatasan atau kurangnya tenaga ahli yang mampu mengelola sumber daya dan sumber alam secara efektif, sedangkan kebutuhan dan tuntutan masyarakat terus meningkat.

Menyadari akan pelaksanaan suatu tugas dalam berkomunikasi dengan masyarakat yang semakin meningkat dan kompleks disertai pula dengan persediaan dana yang relatif kecil dan terbatas, oleh karenanya hambatan-hambatan sosial yang terjadi serta keterbatasan tenaga ahli yang membuat kendala, namun Camat telah berusaha dengan sekuat tenaga dan pikiran sesuai dengan kemampuan yang ada untuk melaksanakan tugas dimaksud dengan seoptimal mungkin.

Seorang pemimpin tidak seyogyanya hanya mampu berperan selaku atasan yang kemauannya harus diikuti oleh orang lain. Namun kepemimpinan juga merupakan seni atau teknik, sekaligus ilmu dalam memberikan perintah atau anjuran, serta pengertian – pengertian agar dapat dipahami oleh orang lain supaya kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi dan menggerakkan orang lain tersebut supaya melakukan sesuatu demi pencapaian tujuan tertentu pula. Jadi dengan demikian pemimpin itu bila terdapat dalam suatu kelompok atau suatu organisasi, maka keberadaan pemimpin tersebut selalu ditengah-tengah kelompok atau organisasinya.

Dalam usaha meningkatkan swadaya masyarakat yang dilakukan oleh Camat sangat erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. Walaupun camat berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan swadaya masyarakat tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat terhadap pembangunan, usaha camat tersebut akan sia-sia saja, demikian pula sebalikinya, walaupun camat tidak berusaha apa-apa untuk meningkatkan swadaya masyarakat, tetapi

bila partisipasi masyarakat besar, maka swadaya masyarakat akan tinggi.

Dalam melaksanakan kepemimpinan Camat selaku orang nomor satu di Kecamatan senantiasa dituntut untuk menciptakan suatu iklim yang kondusif bagi terciptanya suasana interaktif, suasana hubungan komunikasi timbal balik antara pemerintah Kecamatan sebagai pimpinan dengan masyarakat sebagai pengikutnya. Dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat yang akan menimbulkan swadaya bagi pembangunan fisik gampong. Dengan komunikasi dan kerjasama yang harmonis dengan berbagai unsur yang ada dalam masyarakat, terutama pemimpin informal, diharapkan dapat menimbulkan swadaya masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie sangat potensial terhadap pelaksanaan pembangunan dibidang pertanian. Oleh karena itu camat bersama-sama dengan petugas terkait turun langsung ke gampong-gampong untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang program pengembangan pertanian karena hasilnya akan dapat menambah pendapatan Masyarakat.

Demikian juga pembangunan di bidang-bidang lainnya, camat selalu memberikan penyuluhan bersama-sama dengan instansi terkait kepada masyarakat, dalam usaha untuk menggerakkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan gampong, melalui komunikasi kelompok maupun dengan cara tatap muka. Dalam usaha meningkatkan swadaya masyarakat yang dilakukan oleh Camat sangat erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. Walaupun seorang Camat berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan swadaya masyarakat tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat terhadap pembangunan, usaha camat tersebut akan sia-sia saja, demikian pula sebalikinya, walaupun camat tidak berusaha apa-apa untuk meningkatkan swadaya masyarakat,

tetapi bila partisipasi masyarakat besar, maka swadaya masyarakat akan tinggi.

Sebagaimana diketahui bahwa Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie sangat potensial terhadap pelaksanaan pembangunan dibidang fisik maupun non fisik. Oleh karena itu camat bersama-sama dengan petugas terkait turun langsung ke gampong-gampong untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang program pengembangan pembangunan di berbagai sektor karena hasilnya akan dapat menambah pendapatan masyarakat seperti pembangunan non fisik yang berupa simpan pinjam perempuan bagi kaum ibu untuk tambahan modal usaha.

Demikian juga pembangunan di bidang-bidang lainnya, Camat selalu memberikan penyuluhan bersama-sama dengan instansi terkait kepada masyarakat gampong, didalam usahanya untuk menggerakkan berbagai partisipasi masyarakat untuk dapat menjalankan pembangunan di gampong, dengan melalui komunikasi kelompok yang mampu menggerakkan mereka dengan cara tatap muka. Di samping itu pula harus mampu menyelenggarakan administrasi gampong yang baik dan dapat menggerakkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam setiap gerak pembangunan, apabila hal ini tidak tercapai, maka akan menghambat lajunya pemerintahan dan pembangunan digampong. Upaya pelaksanaan pemerintahan gampong sejak dahulu sampai dengan sekarang telah terarah dan mempunyai dasar hukum serta dasar-dasar administrasi pemerintahan gampong yang kuat sehingga program pembangunan gampong yang didukung oleh pemerintahan gampong dapat berjalan secara efisien dan efektif, juga sekaligus akan memberikan dorongan kepada masyarakat untuk dapat tumbuh kearah kemajuan yang dinamis dan dapat memenuhi tuntutan perkembangan yang berdasarkan demokrasi Pancasila dan juga akan berpengaruh terhadap kelancaran roda

pemerintahan. Di dalam pelaksanaan pemerintahan gampong secara efektif dan efisien itu maka sebagai faktor pendukung haruslah adanya suatu sumber daya manusia, material dan dana yang efektif dan efisien tersebut. Jadi unsur manusia dalam hal ini adalah orang-orang sebagai pelaksana kegiatan pemerintah gampong yaitu perangkat pelaksana pemerintahan gampong yang terdiri dari, Sekretaris Gampong dan Kepala-Kepala Urusan yang membidangi bidangnya masing-masing. Dengan adanya perangkat gampong selaku pembantu Keuchik dalam menjalankan roda Pemerintahan di gampong, sehingga semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang diemban oleh Pemerintah Gampong dapat terlaksana sebagaimana mestinya, dan juga memberi pengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan Gampong

5. Simpulan dan Saran

Simpulan

Sistem pelayanan publik dalam menunjang pembangunan di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie belum terlaksana sebagaimana mestinya dikarenakan dijumpai berbagai faktor penghambat,

Hambatan yang ditemui antara lain, pelayanan yang diberikan masih kurang maksimal karena sarana dan prasarana yang dimiliki seperti Komputer, Camat kurang menggunakan jalur informal dalam menyampaikan informasi tentang pembangunan kepada masyarakat, Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga adakalanya komunikasi yang dilakukan oleh camat relatif kurang memuaskan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membangun sehingga meskipun komunikasi yang dilaksanakan baik, tetapi partisipasi masyarakat terhadap pembangunan, terutama partisipasi aktif yang bersifat peningkatan swadaya relatif kurang.

Saran

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik guna menunjang pembangunan di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, perlu dilengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terpenuhi, dan apabila pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai tidak mungkin pelayanan sesuai dengan yang diinginkan, Dalam setiap pertemuan-pertemuan yang dilakukan, berkenaan dengan pembangunan yang akan dicapai, hendaknya Pemerintah Kecamatan lebih mendengarkan aspirasi dari masyarakatnya, Perlunya melakukan usaha-usaha agar lembaga sosial yang ada dalam masyarakat dapat difungsikan dengan sepenuhnya demi kepentingan masyarakat itu sendiri

Daftar Pustaka

- Bayu Suryaningrat (2010), *Wewenang, Tugas dan Kewajiban Camat*, Susunan, Jakarta.
- Bajuri (2012) *Kebijakan Publik, Konsep dan Strategi*, Undip: Semarang
- Effendi, Onong Uchyana (2010), *Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Harbani Pasolong (2012) *Administrasi Publik*, Gunung Agung: Jakarta
- Pamuji (2010), *Pembinaan Perkantoran di Indonesia*, PT.Ihktiar Baru Van Hove, Jakarta.
- Syafiie, Kencana Inu (2011), *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hassan Shadily (2014), *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali, Jakarta
- I.Nyoman Beratha (2010), *Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Onong Udiyani Effendi (2011) *Hubungan Masyarakat Suatu studi Komunikasiologi*, Rajawali Karya, Bandung
- Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.*
- Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa*
- Qanun Kabupaten Pidie Nomor. 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dalam Kabupaten Pidie*